

Antecedents of Accountability in Village Fund Management

Hilda Safitri¹, Novita WeningTyas Respati²

Faculty of Business and Economics, Lambung Mangkurat University, Indonesia

Abstract: *In the study, re-testing factors that are thought to have an impact on the accountability of village fund management was carried out. The purpose of the study was to test the influence of Community Participation, Use of Information Technology, Competence of Village Apparatus, and Internal Control System on the Accountability of Village Fund Management. The object of the study was a village device in Astambul Subdistrict of Astambul District. The population in the study numbered 308. Sampling using judgment sampling. The number of samples analyzed was 150 respondents. Primary data was collected through questionnaires that were directly directed to the respondents. Test the hypothesis using multiple linear regression. The results of the study show that community participation has no impact on the accountability of village management. However, the use of technology, the competence of the village apparatus, and the internal control system have a positive impact on the accountability of the management of the Village Fund. The research is expected to be input, information and consideration for village administration, for example by adding means of community aspiration, maximum use of information technology, procurement of seminars and training, and carrying out an inventory of village assets.*

Keywords: *information technology, competence, internal control, accountability, village funds.*

Article Info:

Received: 7 September 2024 | **Revised:** 14 January 2025 | **Accepted:** 31 January 2025

¹ E-mail: hildasftri24@gmail.com

² E-mail: nwrespati@ulm.ac.id (Correspondence Author)

Antesenden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hilda Safitri¹, Novita WeningTyas Respati²

Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Abstract: Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian ulang faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Teknologi Informasi, Kompetensi Perangkat Desa, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Objek penelitian adalah perangkat desa di Kecamatan Astambul, Kabupaten Astambul. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 308. Pengambilan sampel menggunakan judgment sampling. Jumlah sampel yang dianalisis adalah 150 responden. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang langsung diberikan kepada responden. Uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan desa. Namun, penggunaan teknologi, kompetensi aparat desa, dan sistem pengendalian internal memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan, informasi, dan pertimbangan bagi administrasi desa, misalnya dengan menambah sarana aspirasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, pengadaan seminar dan pelatihan, serta melakukan inventarisasi aset desa.

Kata-kata kunci: teknologi informasi, kompetensi, pengendalian internal, akuntabilitas, dana desa.

1. PENDAHULUAN

Dana desa disediakan pemerintah agar desa di Indonesia dikendalikan dan dikembangkan secara teratur. Anggaran yang disalurkan tersebut wajib dilaporkan selaras dengan regulasi yang berjalan. Tolak ukur pertanggungjawaban pengendalian anggaran dilihat dari akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2021 akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintahan terhadap pengelolaan sumber daya yang diperoleh. Pada dasarnya akuntabilitas memiliki arti penting dalam sebuah pemerintahan, sebab akuntabilitas sendiri adalah bentuk pembuktian oleh pemerintah kepada masyarakat terkait berbagai macam kegiatan dan program yang dijalankan. Maka dari itu, Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat menjadi salah satu tolak ukur pertanggungjawaban anggaran desa. Jika akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah baik, artinya segala kegiatan dan program yang dilaksanakan pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan desa yang diperoleh kemudian dikelola berdasarkan ketentuan yang telah berlaku yaitu pada UU RI No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa serta Permenkeu No. 201/PMK.07/2022 berkenaan dengan pengelolaan dana desa. Walaupun pengelolaan tersebut telah dibenahi, kasus masih banyak terjadi. ICW (*Indonesia Corruption Watch*) mendata dari 2015 hingga 2021, masalah terjadi ada sekitar 592 kasus, negara rugi sekitar sekitar 433,8 miliar rupiah. Selain itu, menurut data yang diungkapkan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel pada Maret 2022, sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 ada 79 laporan atas tindak pidana korupsi senilai 98,38 miliar rupiah, yang didominasi oleh temuan mengenai anggaran desa. Menurut BPKP Provinsi KalSel terkait dengan kasus dana desa mengatakan bahwa hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman perangkat desa terkait tindakan korupsi. Pada tahun 2023, ada beberapa oknum kades yang dijerat kasus terkait pertanggungjawaban pengelolaan bantuan desa. Berlandaskan temuan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di PN (Pengadilan Negeri) Kota Banjarmasin, setidaknya ada lima kasus anggaran desa yang sudah diproses yang satu diantaranya merupakan kasus terkait anggaran dana desa tahun 2018 (Stream et al., 2023). Selain itu, ada 17 perkara terkait dana desa yang terjadi dan telah diberikan vonis. Semua kasus yang terjadi tentu selalu berdampak buruk dan merugikan negara, di mana dalam salah satu kasus saja salah satu terdakwa telah merugikan negara sekitar Rp 467.668.000

Berdasarkan uraian kasus yang terjadi, terdapat beberapa aspek yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi informasi, kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian internal. P. I. Pratiwi & Dewi (2021) menyatakan partisipasi masyarakat dinilai meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Hasil penelitian Amaliya & Maryono (2020); Deviyanti & Wati (2022); Panjaitan et al. (2022); Y. N. Pratiwi et al. (2021); dan Rifa'i et al. (2021) menyebutkan adanya pengaruh positif partisipasi masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang terlaksana di sebuah pemerintahan desa. Namun, berbeda dengan Indraswari & Rahayu (2021); Nazar et al. (2021); dan Yanto & Aqfir (2021) yang tidak

menemukan adanya dampak partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Kompetensi aparatur juga dinilai penting pada akuntabilitas kelola anggaran desa. Kompetensi dinilai sebagai aspek yang memengaruhi akuntabilitas dalam kelola anggaran desa Aziiz (2019); Fajri et al. (2021); Febriyanti (2020); Rifa'i et al. (2021); dan Tharis et al. dan (2022). Kemudian menurut Amaliya & Maryono, (2020); Kusrawan et al., (2022); Mattoasi et al. (2021); Polutu et al. (2022); Suryani & Suprasto (2021) ditemukan kompetensi aparatur desa memberi dampak positif pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Namun, Widyatama et al. (2017) menyatakan temuan yang berbanding terbalik dengan riset sebelumnya bahwa adanya pengaruh negatif kompetensi pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Sebaliknya, penelitian Indraswari & Rahayu (2021) tidak menemukan adanya dampak kompetensi pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Aspek lain yang diduga berdampak pada akuntabilitas ialah teknologi informasi. Selain kompetensi serta partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi informasi menjadi instrumen yang krusial dalam perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana. Riset dari Deviyanti & Wati (2022); Indraswari & Rahayu (2021); Kusrawan et al. (2022); dan Ningsih (2021); dan Panjaitan et al. (2022) menyatakan adanya dampak positif diantara pemanfaatan teknologi informasi (TI) serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Teknologi informasi pemerintah dinilai dapat memudahkan melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat/publik dan transparan dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, riset Pahlawan et al. (2020); Raidah Adillah, Rahma Nazilla Muhammad (2021) mengatakan bahwa tidak adanya pengaruh dari penggunaan TI pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Aspek pendorong meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran desa yaitu sistem pengendalian internal. Sari & Asmara (2020) mengungkapkan yakni sistem pengendalian internal digunakan untuk membentuk sebuah kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan anggaran desa bahwa telah diarahkan sesuai regulasi yang ada. Penelitian yang dilaksanakan oleh Amaliya & Maryono (2020); Aziiz (2019); Polutu et al. (2022); Rifa'i et al. (2021); Widyatama et al. (2017) sepakat mengungkapkan sistem pengendalian internal (SPI) dalam sebuah pemerintahan desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Namun, riset dari Pahlawan et al., (2020) tidak menemukan pengaruh SPI pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Penelitian ini menguji kembali studi Deviyanti & Wati (2022) yang mengkaji dampak partisipasi masyarakat, kompetensi, serta pemanfaatan TI pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Perbedaannya meliputi objek yang diteliti, indikator yang digunakan, dan penambahan variabel sistem pengendalian internal.

2. TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan mengungkapkan sebuah korelasi sebab-akibat diantara agen dan prinsipal berdasarkan kontrak atau konflik yang terjadi diantara keduanya (agen dan prinsipal) menurut (Halim & Abdullah, 2006). Dalam pelaksanaannya prinsipal membuat sebuah kontrak atau perjanjian bersama agen (pemerintah) dengan tujuan agar agen (pemerintah) dapat bertindak sesuai dengan keinginan principal dalam hal ini adalah masyarakat. Pada teori keagenan ini, agen terikat perjanjian dengan prinsipal untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang kepentingan (prinsipal).

Masalah keagenan khususnya pada penganggaran dalam pemerintahan dapat dilihat bahwa eksekutif bertindak sebagai agen sedangkan legislatif sebagai principal, namun ketika kita berbicara publik maka legislatif akan bertindak sebagai agen dan publik lah yang menjadi principal. Hubungan keagenan ini kemudian dapat dilihat pada saat penganggaran, konsep perwakilan yang biasanya diterapkan tidak dapat berjalan dengan sepenuhnya karena adanya perilaku oportunistik (*moral hazard*). Perilaku oportunistik di satuan kerja (agen) dinilai menjadi hal yang perlu untuk disoroti, lebih tepatnya hal ini kemudian dapat dilihat sebagai bentuk adanya konflik kepentingan antara principal dan agen (Halim & Abdullah, 2006). Agen memiliki informasi lebih dalam pengelolaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan principal minim dengan informasi. Hal ini akan menyebabkan adanya asimetri informasi.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan “keterlibatan masyarakat untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan serta potensi yang terdapat dalam lingkup masyarakat, pemilihan sampai penentuan keputusan mengenai preferensi solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat” (Y. N. Pratiwi et al., 2021). Dalam teori keagenan masyarakat desa (principal) merupakan komponen penting yang berkaitan langsung dengan teori keagenan dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa (Y. N. Pratiwi et al., 2021). Masyarakat sebagai prinsipal juga harus terlibat dalam segala bentuk pengambilan keputusan maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai agen. Akuntabilitas pelaksanaan anggaran desa juga tak luput dari partisipasi masyarakat, sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah desa pastinya selalu menyampaikan realisasi anggaran dana desa kepada masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dinilai berefek positif pada akuntabilitas pengelolaan anggaran. Hal itu kemudian menunjukkan adanya hubungan yang berbanding lurus, semakin taraf partisipasi masyarakat desa meningkat sehingga maka tinggi tingkat responsibilitas pelaksanaan anggaran (P. I. Pratiwi & Dewi, 2021; Amaliya & Maryono, 2020); Deviyanti & Wati, 2022); Panjaitan et al., 2022); Y. N. Pratiwi et al., 2021); dan Rifa'i et al., 2021). Artinya pemerintah desa selaku agen bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pada masyarakat desa sebagai prinsipal.

H1: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi Informasi yakni “sarana serta prasarana yang terdiri dari *software*, *hardware*, *useware* sistem atau metode guna mendapatkan, melakukan pengiriman, pengolahan, penafsiran, penyimpanan, mengorganisasikan, serta memakai data dengan baik” (Pahlawan et al., 2020). Teknologi dan Informasi memberikan ruang bagi pemerintah desa instansi agar lebih efisien, efektif dan memudahkan penyampaian informasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat. Bentuk nyata penerapan teknologi informasi pada pemerintahan desa yaitu dengan penerapan sistem keuangan desa (siskeudes). Makin baik penerapan Teknologi Informasi dalam pemerintahan desa, dengan demikian akuntabilitas anggaran desa makin baik. Pernyataan didukung riset oleh Indraswari & Rahayu (2021) yang menemukan adanya dampak signifikan serta positif pemanfaatan Teknologi Informasi pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

H2: Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Polutu et al. (2022) kompetensi kerja yakni segala kapabilitas, sifat, keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang dipelajari atau didapatkan melewati pengalaman, pelatihan, serta pendidikan sehingga bisa menjalankan tugas serta pekerjaannya dengan relatif baik. Agar tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya keahlian atau keterampilan dalam mengelola tugas yang telah ditetapkan. Dalam teori keagenan, pemerintah sebagai agen yaitu pihak yang diberikan amanah oleh prinsipal untuk melakukan kelola atas urusan pemerintahan dan mendahulukan kepentingan prinsipal di atas kepentingan dirinya sendiri. Agar pemerintah sebagai agen bertindak sesuai kehendak prinsipal dan tidak menyimpang, maka agen memerlukan kompetensi untuk menjadi pengelola.

Febriyanti (2020) juga menyebutkan bahwa aparatur harus memiliki kompetensi melakukan pengelolaan serta pertanggungjawabannya, dikarenakan aparatur yang memiliki kapabilitas tata kelola anggaran desa dinilai bisa menaikkan responsibilitas pelaksanaan anggaran. Amaliya & Maryono, (2020); Kusrawan et al., (2022); Mattoasi et al. (2021); Polutu et al. (2022); Suryani & Suprasto (2021) menemukan dampak positif diantara kompetensi aparatur desa serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam penelitiannya. Artinya, makin baik kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan anggaran desa, dengan demikian makin tinggi akuntabilitas anggaran desa.

H3: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal adalah “sebuah struktur organisasi, metode serta ukuran yang kemudian dilakukan pengkoordinasian guna melakukan penjagaan asset organisasi, memeriksa keandalan serta ketelitian data secara akuntansi serta memberi dorongan efisiensi serta kepatuhan kebijakan yang telah ditetapkan” (Polutu et al., 2022). Sistem pengendalian internal digunakan guna membentuk rasa percaya masyarakat terkait pada pengelolaan Dana Desa bahwasanya telah diselenggarakan selaras dengan regulasi yang berjalan.

Sistem pengendalian internal dinilai sangat krusial dalam pemerintah dikarenakan sistem pengendalian digunakan sebagai landasan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Maka, jika SPI sebuah pemerintahan desa efektif maka akan meningkat akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa (Amaliya & Maryono, 2020); Aziiz, 2019); Polutu et al., 2022); Rifa'i et al., 2021); Widyatama et al., 2017).

H4: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ialah asosiatif. Objek yang diteliti yaitu perangkat desa pada pemerintahan desa serta perwakilan masyarakat di 22 desa Kecamatan Astambul yaitu Astambul Kota, Jati Baru, Astambul Seberang, Pingaran Ulu, Sungai Alat, Pingaran Ilir, Pasar Jati, Danau Salak, Kaliukan, Tambak Danau, Kalampaian Ilir, Kalampaian Ulu, Limamar, Lok Gabang, Sungai Tuan Ilir, Pematang Hambawang, Banua Anyar Sungai Tuan, Kalampaian Tengah, Tambangan, Sungai Tuan Ulu, Banua Anyar Danau Salak, serta Munggu Raya.

Pada penelitian dengan total 308 responden. Metode *purposive sampling* sebagai teknik penarikan sampel, dengan memakai kriteria sampel berlandaskan Permendagri No113 Tahun 2014 dimana meliputi aparat desa kepala desa sebagai pihak otoritas dalam keuangan desa, serta perangkat desa sebagai penyelenggara keuangan mencakup sekretaris desa, kasi, serta kaur. Selain aparat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Masyarakat (ketua RT) juga dinilai memiliki andil dalam pengelolaan dana desa sehingga ditambahkan sampel BPD dan Masyarakat masing-masing 1 (satu) orang dengan kriteria aparatur desa dan BPD telah menjabat 1 tahun.

Variabel yang dilakukan uji pada penelitian ini ditampilkan dalam tabel 1 Data primer dilakukan pengumpulan dengan memakai kuesioner yang dilakukan pendistribusian secara langsung pada responden.

Tabel 1. Tabel Variabel, Definisi Operasional Variabel, dan Indikator Pengukuran

No.	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator
1.	Variabel Dependen		
	Akuntabilitas dana desa	Akuntabilitas merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintahan akan pengelolaan sumber daya yang diperoleh. Pada dasarnya akuntabilitas memiliki arti penting dalam sebuah pemerintahan, akuntabilitas sendiri merupakan bentuk pembuktian oleh pemerintah kepada masyarakat terkait dengan berbagai macam kegiatan dan program yang dijalankannya (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan serta kejujuran informasi 2. Kecukupan informasi 3. Kepatuhan pada pelaporan 4. Keselarasan tata cara 5. Kesesuaian penyampaian laporan.
2.	Variabel Independen		
	Partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi sebuah masalah serta potensi yang terdapat di dalam lingkup masyarakat, pemilihan sampai pengambilan keputusan mengenai alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Menurut (Y. N. Pratiwi et al., 2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan pada pengambilan keputusan seluruh program desa 2. Melakukan pengusulan rencana anggaran 3. Terlibat melakukan pengawasan serta pelaporan 4. Memberi penilaian penyelenggaraan anggaran 5. Memberikan penghargaan.
	Teknologi informasi	TI yakni fasilitas yang mencakup software,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan Kerja secara elektronik

	<p>hardware, useware sistem atau metode guna mendapatkan, melakukan pengiriman, pengolahan, penafsiran, penyimpanan, mengorganisasikan, serta memakai data dengan baik. Teknologi dan Informasi memberikan ruang bagi pemerintah desa instansi agar lebih efisien, efektif dan memudahkan penyampaian informasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat Menurut (Pahlawan et al., 2020).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelolaan Informasi dengan jaringan internet 3. Sistem manajemen 4. Pengelolaan serta penyimpanan data keuangan 5. Pemeliharaan serta perawatan pada perangkat komputer.
Kompetensi kerja	<p>Kompetensi kerja mengacu pada serangkaian kualitas, kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang komprehensif yang diperoleh atau dikembangkan oleh seorang individu melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman praktis. Atribut-atribut ini memungkinkan individu untuk secara efektif memenuhi tanggung jawab mereka dan berkinerja luar biasa dalam profesi mereka. Kecakapan pemerintah desa sangat penting dalam mengawasi keuangan daerah Menurut (Polutu et al., 2022).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Kapabilitas guna menaikkan pengetahuan 3. Kemahiran teknis 4. Kapabilitas melakukan pencarian solusi 5. Inisiatif dalam bekerja 6. Kesopanan serta keramahan.
Sistem pengendalian internal	<p>SPI yakni sebuah struktur organisasi, metode serta ukuran yang kemudian dilakukan pengkoordinasian guna melakukan penjagaan asset organisasi, memeriksa keandalan serta ketelitian data secara akuntansi serta memberi dorongan efisiensi serta kepatuhan kebijakan yang telah ditetapkan (Polutu et al., 2022).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Informasi Komunikasi 3. Penilaian Risiko 4. Aktivitas Pengendalian 5. Monitoring Pengendalian Internal

Sumber Data: Berbagai referensi yang diolah kembali, 2024

Analisis data meliputi uji validitas serta uji reliabilitas untuk uji kualitas data, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas data, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas. Berlandaskan pendapat Ghozali (2016) Uji autokorelasi tidak dilakukan pada penelitian uji tersebut hanya digunakan untuk observasi secara berurutan dari waktu ke waktu yang berkaitan dan hanya jika terdapat adanya korelasi antar variabel dengan rentang waktu tertentu. Model regresi berganda guna uji hipotesis yakni:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y: Variabel Dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a: Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄: Koefisien Regresi Variabel

X₁: Partisipasi Masyarakat

X₂: Penggunaan Teknologi Informasi

X₃: Kompetensi Aparatur Desa

X₄: Sistem Pengendalian Internal

e: Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian dianalisis sejumlah 150 responden bisa diamati pada tabel 2. Karakteristik responden dilihat dari pendidikan terakhir, umur, jenis kelamin, jabatan serta lama masa bekerja pada tabel 3. Tabel 4 menampilkan uji statistik.

Tabel 2. Tabel Sampel Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah Responden	Persentase
1.	Kepala Desa	19	12,70%
2.	Sekdes	20	13,30%
3.	Kaur Keuangan	19	12,70%
4.	Kaur Umum dan Perencanaan	16	10,70%
5.	Kasi Pemerintahan	18	12,00%
6.	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	16	10,70%
7.	BPD	22	14,70%
8.	Masyarakat (RT)	20	13,30%
Total		150	100,00%

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2024

Tabel 3. Tabel Karakteristik Responden

Keterangan	N	%
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	126	84%
Perempuan	24	16%
Total	150	100%
Umur		
21-30	39	26,00%
31-40	55	36,70%
41-50	44	29,30%
51-60	10	6,70%
61-70	2	1,30%
Total	150	100,00%
Pendidikan Terakhir		
SD	8	5,30%
SMP	2	1,30%
SMA	95	63,30%
S1	42	28,00%
Lainnya	3	2,00%
Total	150	100,00%
Masa Kerja		
1 s/d 5 Tahun	113	75,30%
> 5 s/d 10 Tahun	32	21,30%
> 10 Tahun	5	3,30%
Total	150	100,00%

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2024

Tabel 4. Tabel Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Min.	Max.	Mean.	Std. Deviation
Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	150	18	30	25,87	2,459
Partisipasi masrayarat (X1)	150	13	25	19,94	2,565
Penggunaan Teknologi Informasi (X2)	150	20	35	29,35	2,979
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	150	18	30	25,24	2,756
Sistem Pengendalian Internal (X4)	150	21	35	30,04	3,061
Valid N (listwise)	150				

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2024

Pengujian validitas dan realibilitas dilakukan guna menguji kualitas data dalam penelitian. Pengujian validitas data memakai metode *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* dengan kriteria keputusan nilai KMO-MSA > 0,5 dengan itu instrumen pada penelitian dinyatakan valid (Ghozali, 2016). Tabel 5 menerangkan seluruh instrumen sudah dinyatakan valid.

Tabel 5. Tabel Uji Validitas

Variabel	KMO – MSA
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,815
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,635
Penggunaan Teknologi Informasi (X2)	0,770
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	0,745
Sistem Pengendalian Internal (X4)	0,867

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2024

Uji reliabilitas berfungsi mengukur indikator dari variabel penelitian, bila jawaban responden pada pertanyaan yang ada di kuesioner dinyatakan konsisten maka kuesioner dinyatakan reliabel. Pengujian menggunakan *Alpha Cronbach* yang memiliki kriteria keputusan bila nilai *Alpha Cronbach* instrumen penelitian >0,6 oleh karenanya variabel sudah reliabel. Tabel 6 menerangkan bahwa seluruh variabel bebas dan terikat telah reliabel.

Tabel 6. Tabel Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,841
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,73
Penggunaan Teknologi Informasi (X2)	0,809
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	0,778
Sistem Pengendalian Internal (X4)	0,879

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2024

Uji asumsi klasik meliputi normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Uji autokorelasi tidak digunakan dikarenakan model data tidak memakai rentang waktu melainkan berupa data primer. Uji normalitas memakai *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Jika temuan perhitungan memiliki tingkat signifikansi >0,05 oleh karenanya data mencukupi asumsi normalitas (Ghozali, 2016). Tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh variabel terdistribusi normal.

Tabel 7. Tabel Uji Normalitas

Unstandardized Residual	Keterangan	
N	150	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,068	Data Berdistribusi Normal

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2024

Uji multikolinearitas membuktikan korelasi diantara variabel independen. Pengujian mengamati nilai *tolerance* serta *variance inflation independent* faktor (VIF). Bila nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10 oleh karenanya ada multikolinearitas, namun bila *tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 oleh karenanya tidak timbul multikolinearitas (Ghozali, 2016). Tabel 8 menunjukkan variabel penelitian tidak timbul multikolinieritas.

Tabel 8. Tabel Uji Multikoleniatitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,745	1,342
Penggunaan Teknologi Informasi (X2)	0,377	2,642
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	0,282	3,547
Sistem Pengendalian Internal (X4)	0,342	2,926

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2024

Uji Heteroskedastisitas memakai uji park dengan kriteria bila P value > 0,05 oleh karenanya variabel dapat dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Tabel 9 menyajikan uji heteroskedastisitas.

Tabel 9. Tabel Hasil Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,784
Penggunaan Teknologi Informasi (X2)	0,31
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	0,853
Sistem Pengendalian Internal (X4)	0,134

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2024

Tahapan selanjutnya melaksanakan uji hipotesis yang mencakup pengujian kelayakan model dalam penelitian (Uji F), pengujian koefisien determinasi (R^2), serta uji T. Hasil uji koefisien R Square sebesar 0,838 (Tabel 10). Hasil ini menampilkan pengaruh variabel partisipasi masyarakat, penggunaan Teknologi Informasi, kompetensi aparatur desa, serta sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah 83,8% dan 16,2% dipengaruhi aspek lain.

Tabel 10. Tabel Uji R^2

Adjusted R square	0,838
-------------------	-------

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2024

Tabel 11. Tabel Uji F

F hitung	F tabel	Nilai Signifikansi (Sig)
193,488	2,43	0,000

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2024

Uji F dalam tabel 11 memperlihatkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $193.488 > 2,43$ dengan nilai Sig. $0,000 < 0,05$ mengungkapkan (X1), Penggunaan Teknologi Informasi (X2), Kompetensi Aparatur Desa (X3), serta SPI (X4) secara simultan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Y). Selanjutnya, temuan uji t tampak dalam tabel 12. Uji hipotesis menggunakan uji t. Penerimaan dan penolakan hipotesis tampak dalam hasil uji T.

Tabel 12. Tabel Hasil Uji t

Coefficients						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Ket.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3,172	0,907		3,496	0,001	
Partisipasi Masyarakat (X1)	-0,082	0,037	-0,086	-2,238	0,027	Ditolak
Penggunaan Teknologi Informasi (X2)	0,151	0,044	0,183	3,41	0,001	Diterima
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	0,339	0,055	0,38	6,124	0	Diterima
Sistem Pengendalian Internal (X4)	0,377	0,045	0,47	8,323	0	Diterima

Sumber Data: Pengolahan SPSS, 2024

Pengaruh partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa

Temuan uji koefisien memiliki nilai negatif -0,842 dengan taraf Sig. $0,027 < 0,05$. Perihal terkait menolak H1 yang mengungkapkan yakni partisipasi masyarakat memberi dampak positif pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hasil riset ini membuktikan partisipasi masyarakat tidak memberi dampak pertanggungjawaban anggaran desa.

Dalam teori agensi, masyarakat sebagai pihak principal mengamankan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa kepada agen yakni pemerintahan desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa wajib menyajikan laporan keuangan mengenai pengelolaan dana desa sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dana yang diamanahkan. Studi ini membuktikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dana desa tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini diduga karena adanya asimetri informasi, di mana masyarakat sebagai principal kurang memperoleh informasi dan pengetahuan terkait pengelolaan dana desa dibandingkan dengan pihak pemerintah desa (agen) sehingga masyarakat tidak sepenuhnya memahami penyelenggaraan keuangan desa baik potensi maupun permasalahannya. Masyarakat hanya menerima keputusan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hasil

empiris ini diperkuat dengan hasil wawancara di mana tidak berpengaruhnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelaksanaan dana desa, rendahnya interaksi antara masyarakat dengan aparat desa, serta minimnya wadah aspirasi masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran.

Pengaruh penggunaan teknologi informasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa

Nilai koefisien regresi positif 0,151 dan taraf Sig. $0,001 < 0,05$. H2 diterima yang mengungkapkan penggunaan teknologi informasi memberi dampak positif dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Terwujudnya pengelolaan dana desa yang baik perlu didukung penerapan teknologi informasi.

Penggunaan teknologi informasi adalah upaya pemerintah desa selaku agen untuk melaksanakan amanah dari masyarakat sebagai principal untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Penggunaan teknologi informasi terintegrasi dapat memudahkan pemerintah desa melakukan pengelolaan, meminimalisasi terjadinya penyimpangan, dan memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan dana desa untuk mewujudkan keterbukaan informasi dalam mengelola dana desa yang merupakan amanah dari masyarakat (agen). Penggunaan teknologi secara tepat dapat mendukung terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik.

Berdasarkan perspektif responden dapat dilihat bahwa mayoritas setuju dengan butir pertanyaan terkait pemerintah desa mempunyai komputer yang cukup dalam menjalankan tugas pengelolaan dana desa, jaringan internet sudah dilakukan pemanfaatan selaku penghubung diantara unit kerja dalam pengiriman data serta informasi terkait pengelolaan dana desa, jaringan internet sudah terpasang di unit kerja desa, laporan akuntansi serta manajerial diberikan hasil dari sistem informasi terintegrasi seperti siskeudes, jadwal pemeliharaan dilakukan dengan teratur, peralatan yang using/didata serta dilakukan perbaikan tepat waktu, dan *software* antivirus diperbarui secara teratur.

Pengaruh kompetensi aparat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil uji menunjukkan koefisien regresi positif 0,339 dengan tingkat Sig. $0,000 < 0,05$. Perihal terkait menampilkan H3 yang mengungkapkan kompetensi aparat desa memberi dampak positif pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Fajri et al. (2021) membuktikan kompetensi sebagai faktor yang berpengaruh kepada akuntabilitas penyelenggaraan dana desa yang kemudian sejalan dengan penelitian ini.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan dana desa akan terwujud apabila pada pelaksanaannya pemerintah desa melaksanakan amanah dengan baik dan penuh tanggungjawab. Agar tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya keahlian atau keterampilan dalam mengelola tugas yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan dana desa yang akuntabel maka aparat desa sebagai agen memerlukan kompetensi baik dari sisi

pemahaman peraturan serta adanya pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pengelola dana desa. Perspektif responden mayoritas setuju dengan butir pernyataan tentang pemahaman peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa, mendapatkan training pengelolaan dana desa, kapabilitas aparatur sangat diperlukan dan memberikan solusi atas kendala yang terjadi, aparatur desa memiliki inisiatif untuk membantu mengelola keuangan desa, dan saling bersikap ramah kepada sesama terutama dalam pelayanan pada masyarakat.

Pengaruh sistem pengendalian internal pada akuntabilitas pengelolaan dana desa

R^2 bernilai positif 0,377 dan nilai Sig. adalah $0,000 < 0,05$. Hasil ini mengartikan H4 SPI memberi dampak positif pada akuntabilitas dana desa. Temuan riset membuktikan sistem pengendalian internal dalam sebuah pemerintahan desa memberi dampak pada akuntabilitas pelaksanaan dana desa. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sebagai agen memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sebagai principal untuk memberikan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Upaya yang dilakukan dengan menerapkan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang dijalankan dengan baik oleh aparat desa (agen) dapat meningkatkan pencegahan penyimpangan dana desa yang dikelola sehingga akuntabilitas dana desa yang dikelola akan berjalan efektif. Berdasarkan perspektif responden mayoritas setuju dengan butir pertanyaan pengawasan internal meliputi kejelasan tugas serta wewenang dalam pemerintahan desa, struktur organisasi desa, rencana pengelolaan untuk mengurangi risiko, adanya pemeriksa keuangan, kas dan barang, adanya dokumentasi bukti pengeluaran kas, komunikasi diselenggarakan dengan terbuka serta efektif serta adanya tindak lanjut atas adanya capaian atau review serta saran dari inspektorat.

5. KESIMPULAN

Bukti empiris menampilkan yakni partisipasi masyarakat tidak berdampak pada akuntabilitas anggaran desa. Hasil uji juga membuktikan pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur desa, SPI mempengaruhi peningkatan pada akuntabilitas dana desa.

Temuan ini diharapkan pemerintah desa menyediakan wadah aspirasi masyarakat seperti kotak kritik dan saran atau aplikasi desa yang digunakan sebagai media sekaligus tempat untuk menampung kritik dan saran dari masyarakat. Penggunaan teknologi informasi secara maksimal seperti *siskeudes*, *microsoft office* dan aplikasi pendukung lainnya diharapkan lebih ditingkatkan. Perlu adanya pelatihan atau seminar secara berkala dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur desa. Pemerintah desa diharapkan dapat melakukan inventarisasi terhadap aset desa serta mengkoordinasikan dokumen yang terdiri dari arsip desa baik itu arsip administrasi, kependudukan, maupun dokumen keuangan secara berkala agar dapat didata, dicatat, dilaporkan dan dikelola dengan baik. Secara teoritis, riset ini memberikan tambahan wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang kajian akuntabilitas penyelenggaraan dana desa.

Penggunaan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data merupakan suatu keterbatasan dalam penelitian ini, karena terkadang jawaban responden tidak sesuai keadaan sebenarnya dan tidak dapat menggali jawaban responden secara mendalam. Indikator variabel penggunaan teknologi informasi masih terbatas pada lingkup penggunaan *software* dan hardware, belum mencakup persepsi pengguna dan kemudahan penggunaan.

Adapun saran untuk riset yang akan datang dapat menggunakan mixed method research, memadukan pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif untuk lebih menggali informasi dari reponden. Studi selanjutnya perlu mengkaji kembali indikator variabel penggunaan teknologi informasi untuk memasukkan indikator persepsi pengguna dan persepsi kemudahan penggunaan. Selain itu, dapat ditambahkan variabel independen komitmen organisasi dan kejelasan dalam sasaran anggaran dalam riset yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, R., & Maryono. (2020). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 122–133. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/page122>
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Deviyanti, N. K., & Wati, N. W. A. E. (2022). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kab Badung). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 36–48. <https://balipost.com>
- Fajri, R., Agusti, R., Julita, & Riau, U. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 17(2), 209–227.
- Febriyanti, G. A. (2020). Indonesia Accounting. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 87–91.
- Ghozali, I. P. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi 9*.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). SAP 2021. *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, 71, 160–173. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Kusrawan, K., Liswatin, L., & Haris, T. S. (2022). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Barowila. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2767–2773. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.780>
- Mattoasi, M., Sapeni, A., & Musue, D. P. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparat Desa Se Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una). *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 3(2), 59. <https://doi.org/10.31314/jsap.3.2.59-65.2020>
- Nazar, S. N., Wulandari, R., Syafrizal, S., & Lestari, A. (2021). Competencies on Execution of Village Government Authorities, Transparency, Public Participation and Accountability of Villages Fund Management. *EAJ (Economic and Accounting Journal)*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.32493/eaj.v4i1.y2021.p59-70>
- Ningsih, L. P. P. S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In *Hita Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 4,

- pp. 183–198). <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2010>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Panjaitan, R. S., Simanjuntak, A., Sembiring, Y. N., & Benyamin Siahaan, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan M. *Jurnal Manajemen*, 8(1), p-ISSN. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53>
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183–198. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.69>
- Pratiwi, Y. N., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.54>
- Raidah Adillah, Rahma Nazilla Muhammad, A. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Dan Penerapan SISKEUDES Terhadap Kualitas Laporan Dana Desa (Survey”Pada”Desa-Desa Di Kecamatan Arjasari) Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerinta. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 261–270. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/download/2445/1900/>
- Rifa'i, M., Jubertus, J., & Susanti, R. A. D. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 919–928. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16044>
- Sari, N., & Asmara, J. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1), 142–149. <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Stream, L., Siaran, P., & Hari, T. K. (2023). *BPKP Hasilkan 79 Laporan Hasil Audit Kasus Korupsi Senilai 98 , 38 Miliar*. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abdi Persada.
- Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2011. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p11>
- Tharis, H., Kusumastuti, R., & Herawaty, N. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Widodo, H. (2023). *Lima Mantan Kades di Kalsel Jadi*. Banjarmasinpost.Co.Id.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan*

Keuangan Indonesia, 2(2). <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>